

Kenaikan Tarif Biaya RSUD Abdul Rivai Wakil Rakyat Berau Minta Kajian Ulang



Sumber gambar : *katakaltim.com* Senin, 04/11/2024

Publik dikejutkan dengan pernyataan Paslon Nomor Urut 01 Agus Wahyudi (AW) yang mengungkapkan biaya Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abdul Rivai naik menjadi 300 persen.

Pernyataan itu diungkapkannya dalam Debat Pilkada jilid 1, yang berlangsung pada Sabtu 26 Oktober lalu yang disiarkan langsung oleh salah satu saluran TV Nasional.

"Ada yang tak disampaikan kepada publik terkait keterbukaan informasi publik, bahwa tarif biaya RSUD Abdul Rivai naik menjadi 300 persen" ungkap AW saat menanggapi Paslon 02 terkait keterbukaan informasi publik.

Perkara itu pun menjadi sorotan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Berau, Grace Warastuty Langsa. Menurutnya pihak rumah sakit, *stakeholder* dan wakil rakyat butuh mengkaji ulang kenaikan tarif biaya itu.

"Kita berharap hal tersebut tidak menimbulkan keluhan-keluhan terhadap masyarakat yang ingin berobat," ucapnya kepada *katakaltim*, Kamis (31/10/2024).

Grace menuturkan bahwa hal itu perlu dipertimbangkan ulang. Apalagi aspek-aspek di luar jangkauan pengelolaan Rumah Sakit Abdul Rivai.

"Ini perlu dibicarakan ulang dan perlu dikaji ulang mengenai kebijakannya, kalau toh dirasa sesuai untuk masyarakat, ya tidak masalah," ujarnya.

Sumber berita:

1. *Katakaltim*, Kenaikan Tarif Biaya RSUD Abdul Rivai, Wakil Rakyat Berau Minta Kajian Ulang, 04/11/24

Catatan:

1. Dalam Pasal 63 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 07 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Perda 7/2022), diatur bahwa jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a meliputi:
 - a. Pelayanan Kesehatan;
 - b. Pelayanan Kebersihan;
 - c. Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; dan
 - d. Pelayanan Pasar.
2. Diatur dalam Pasal 70 ayat (1) Perda 7/2023 bahwa prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengadilan atas pelayanan tersebut.